

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan prasyarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan dapat diterima (legitimate) sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut di atas, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya. Pertanggungjawaban dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan

wewenang (amanat) melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, berupaya menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana diamanatkan Inpres No 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan atas tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, RPJMD Provinsi Jawa Barat, kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Ketahanan pangan yang diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816), serta kebijakan Pemerintah Pusat di bidang ketahanan pangan dari Kementerian Pertanian maupun Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Penyusunan laporan ini secara umum berpedoman pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berisikan mengenai sasaran strategis, kebijaksanaan dan program/kegiatan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat dapat diketahui secara luas, sehingga dapat dijadikan media dalam pengambilan keputusan dan perbaikan guna tercapainya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok & fungsi (tupoksi) masing-masing Unit pelaksana di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Oleh karenanya laporan ini juga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengevaluasi diri khususnya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berguna bagi perencanaan dan peningkatan kinerja masing-masing bagian.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741), serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok **"menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan urusan pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan"**.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi : (1) Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan; (2) Penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi pangan, serta distribusi dan harga pangan; (3) Penyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB.

Dalam kaitan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berikut adalah peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan LAKIP Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.
10. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
11. Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 055/Kep.116/Skr/BKP/2013 Tentang Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018

1.3. Tupoksi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat

Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD) Propinsi Jawa Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, berkedudukan sebagai

Pelaksana Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam Penanganan Bidang Ketahanan Pangan.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat No 49 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Badan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- b. penyelenggaraan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- c. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan tugas pokok badan serta mengkoordinasikan dan membina UPTB.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, Kepala Badan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan, penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan yang meliputi kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
 - b. penyelenggaraan perumusan dan penetapan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang ketahanan pangan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang ketahanan pangan;

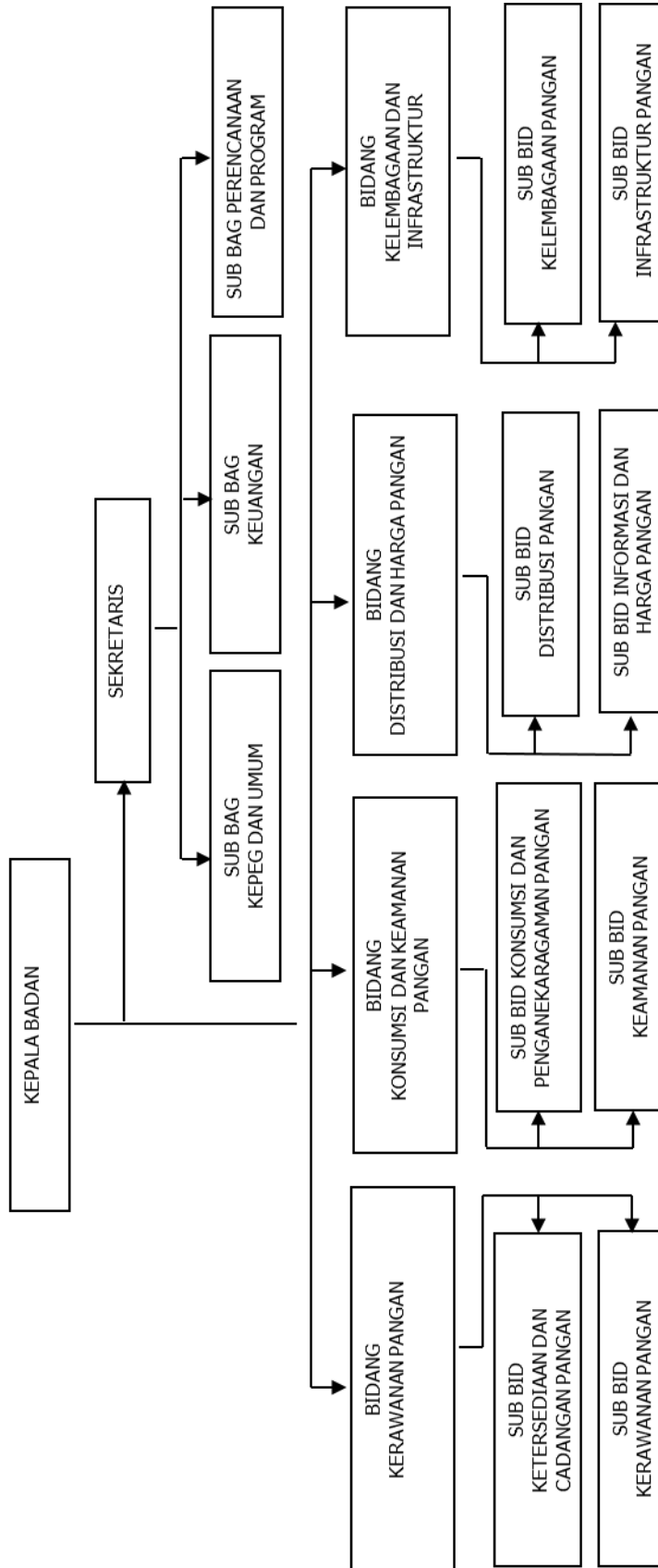
- d. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Badan.
- e. penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTB.

(3) Rincian Tugas Kepala Badan :

- a. memimpin, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis badan sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintah daerah bidang ketahanan pangan;
- d. menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan ketahanan pangan di Provinsi;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- f. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Pemerintah/ Swasta/Lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaks.kegiatan Badan.
- g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan LAKIP, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, kesekretariatan, kelembagaan dan infrastruktur, ketersediaan dan kerawanan pangan, konsumsi dan keamanan pangan, serta distribusi dan harga pangan;
- h. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dibidang ketahanan pangan;
- i. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan UPTB;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagaimana terlihat pada Gambar 1.

GB. 1. STRUKTUR ORGANISASI BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NO. 22 TAHUN 2008
(YANG BERLAKU SAAT INI)



BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan

Tujuan pembangunan ketahanan pangan adalah untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan seluruh penduduk yang cukup, bermutu, bergizi seimbang, aman dan halal baik pada tingkat nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa hingga rumah tangga. Ketahanan pangan harus diwujudkan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu, yang didasarkan pada optimalisasi dan berbasis keragaman sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal. Mengingat pangan juga merupakan komoditas ekonomi, maka dalam pembangunannya dikaitkan dengan peluang pasar dan peningkatan daya saing, yang dibentuk dari keunggulan spesifik lokasi, keunggulan kualitas serta efisiensi dengan penerapan teknologi inovatif. Produksi pangan sebagian besar dilaksanakan oleh petani/masyarakat dengan skala usaha kecil di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan sekaligus mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kelaparan.

Konsep Dasar Ketahanan Pangan dan Pentingnya Upaya Penguatan Ketahanan Pangan. Ketika pertama kali dikenalkan dalam konferensi pangan dunia tahun 1974, konsep dasar ketahanan pangan dimaknai sebagai: situasi dimana terdapat ketersediaan pangan yang cukup dan dengan harga yang stabil sepanjang waktu. Ketersediaan pangan yang cukup diartikan sebagai situasi dimana jumlah bahan pangan yang dibutuhkan oleh seluruh penduduk tersedia cukup baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas. Harga pangan yang stabil diartikan sebagai situasi dimana harga pangan tidak mengalami kenaikan yang berarti sepanjang waktu. Pengertian ini menempatkan penyediaan pangan dan stabilisasi harga sebagai dua pilar utama strategi penguatan ketahanan pangan di banyak negara, termasuk di Indonesia, dalam periode 1970-an.

Dalam perkembangannya, konsep ketahanan pangan mengalami perluasan makna, yakni: dari berpenekanan pada aspek ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh penduduk menjadi berpenekanan pada hak setiap orang memperoleh pangan

yang cukup sepanjang waktu. Makna yang terakhir ini secara eksplisit dinyatakan definisi ketahanan pangan yang kemukakan oleh FAO dalam konferensi pangan dunia tahun 1996, berikut: "ketahanan pangan [baru] terjadi ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomis pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan makanan dan seleranya dalam rangka kehidupan yang sehat dan aktif." Definisi ketahanan pangan versi FAO ini merupakan definisi yang paling luas digunakan dewasa ini. Di dalamnya terkandung pengertian bahwa sebuah negara tidak dapat dikatakan memiliki ketahanan pangan yang mantap apabila masih ada penduduknya yang kelaparan atau kurang gizi.

Ketahanan pangan adalah misi setiap negara. Ini karena akses terhadap pangan merupakan hak azasi manusia yang harus dijamin negara. Di samping itu, terdapat sedikitnya tiga alasan lain dari pentingnya upaya penguatan ketahanan pangan. Pertama, penguatan ketahanan pangan berarti meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pangan sehingga mereka dapat hidup produktif untuk dapat meningkatkan status kehidupan ekonominya. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan Abad 21: pengurangan jumlah orang miskin dan kelaparan. Kedua, penguatan ketahanan pangan diperlukan dalam rangka menyediakan sumberdaya manusia sehat dan berkualitas untuk meningkatkan produktifitas dan daya saing nasional. Ketiga, penguatan ketahanan pangan juga meningkatkan keamanan nasional. Tersedianya akses terhadap pangan yang cukup bagi semua dapat mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan kerawanan sosial di masyarakat yang dipicu oleh situasi kerawanan pangan.

Berdasarkan kerangka tersebut, Badan Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang ketahanan pangan mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan/bebas dari kelaparan dan kerawanan pangan.

Dalam rangka memelihara kesinambungan proses pembangunan dan melanjutkan berbagai pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan serta sebagai upaya untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada masa mendatang. Rencana strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan Badan

Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Rencana Strategis Tahun 2013 s/d 2018

a) Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan

Dalam mewujudkan Visi Jawa Barat yaitu " **Jawa Barat Maju dan Sejahtera Untuk Semua**" makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Maju : adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Untuk Semua : adalah kondisi dimana hasil pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan, elemen dan komponen masyarakat. Badan Ketahanan Pangan mempunyai peranan yang strategis dengan mengemban misi ke dua yaitu *Membangun Perekonomian yang Kokoh dan Berkeadilan*. Hal ini untuk menciptakan sosok Jawa Barat 2018 yaitu Perekonomian Jawa Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar negeri, menyerap banyak tenaga kerja, serta memberikan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Misi kedua tersebut memiliki tujuan *mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah* dengan salah satu sasarannya adalah *meningkatkan pembangunan ekonomi perdesaan dan regional*. Pembangunan ekonomi perdesaan mensyaratkan kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan

kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.

Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan diyakini merupakan salah satu jalan utama untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya yang sebagian besar berada di perdesaan, serta menjadi bagian indikator kinerja dari misi kedua dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat yaitu pencapaian *Skor Pola Pangan Harapan* sebesar 76 point pada tahun 2016.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang bidang Ketahanan Pangan di Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat menetapkan visi yang hendak dicapai adalah,

“Menjadi Institusi Handal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Yang Berkelanjutan”

Arti dari visi tersebut adalah bahwa Badan Ketahanan Pangan berkeinginan menjadi institusi yang memiliki kekuatan, kemampuan dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup baik kualitas maupun kuantitas secara terus menerus setiap waktu diseluruh pelosok wilayah Jawa Barat.

Visi tersebut hanya dapat dicapai, apabila :

1. Pemerintah sebagai regulator mampu menyediakan pangan yang cukup setiap waktu, serta mampu mendistribusikannya secara merata ke seluruh Wilayah,
2. Semua lapisan masyarakat mempunyai kemampuan untuk mengakses pangan, sehingga pangan tersedia di setiap rumah tangga.

Untuk mencapai Visi tersebut, maka ditetapkan 4 Misi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

- 1) Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor
- 2) Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan masyarakat, Berbasis Potensi Lokal
- 3) Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan.

b) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan

Pada sub bagian ini disampaikan mengenai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 yang menjadi target untuk dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor

Tujuan : Meningkatkan kemudahan dan kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan

Sasaran :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup

Indikator Sasaran :

- a. Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan sebesar 85 %
- b. Jumlah tonase cadangan pangan pokok pemerintah sebesar 400 ton setiap tahun

2. Stabilitas pasokan dan harga pangan

Indikator Sasaran :

Persentase Capaian Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis sebesar ≥ 100

2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal

Tujuan : Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal

Sasaran :

1. Peningkatan kualitas pangan dan gizi

Indikator Sasaran :

- a. Persentase tingkat konsumsi pangan energy sebesar 2050 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 56 gr/kapita/hari

b. Skor Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi sebesar 78 point

2. Peningkatan keamanan pangan

Indikator Sasaran :

Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat sebesar 85 %

3. *Meningkatkan Penanganan Daerah rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat*

Tujuan : Menurunkan desa rawan pangan

Sasaran :

Penurunan desa rawan pangan.

Indikator Sasaran :

Jumlah lokasi desa piloting pemanfaatan lahan pekarangan sebesar 100 %

4. *Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan*

Tujuan : Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan

Sasaran :

Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan

Indikator Sasaran :

Persentase program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota sebesar 75%

i. Strategi, Kebijakan dan Program

Strategi dan Kebijakan

1. Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor

Strategi :

Akses pangan dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, distribusi pangan serta kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karena itu Koordinasi lintas sektor melalui peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan sangat diperlukan untuk :

- Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah,
- Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual , pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan.

Kebijakan :

- a. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- b. Pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis.
- c. Pengembangan Buffer Stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis.

2. Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal

Strategi :

- Peningkatan Skor PPH melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani.
- Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya
- Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana, dalam rangka mengurangi jumlah penderita gizi kurang, termasuk kurang gizi mikro (kurang vitamin dan mineral) yang diprioritas pada kelompok penentu masa depan anak, yaitu, ibu hamil dan calon ibu hamil/remaja putri, ibu nifas dan menyusui, bayi sampai usia dua tahun tanpa mengabaikan kelompok usia lainnya;
- Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan

Kebijakan :

- a. Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018.
- b. Implementasi Peraturan Gubernur No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal
- c. Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk;
- d. Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gub.. Nor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat.

3. Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan Melalui Pemberdayaan Masyarakat

Strategi :

- Meningkatkan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai.
- Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan.

Kebijakan :

- a. Implementasi Keputusan Gubernur No. 465.05/Kep 367-BPMPD/2010 tanggal 5 Feb 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
- b. Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture.

4. Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Kelembagaan Ketahanan Pangan

Strategi :

1. Mensinergikan program dan kegiatan ketahanan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan kapasitas kompetensi SDM aparatur dan masyarakat bidang ketahanan pangan

Kebijakan :

- a. Peningkatan Dewan Ketahanan Pangan
- b. Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan pangan

Tabel 1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : "Menjadi Institusi Andal Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan"			
MISI I Memantapkan Akses Pangan Masyarakat Melalui Koordinasi Lintas Sektor			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Kemudahan dan Kemampuan Masyarakat Untuk Mengakses Pangan	Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup	- Meningkatkan kapasitas produksi pangan melalui penetapan lahan abadi untuk produksi pangan dalam rencana tata ruang wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan serta sumberdaya lahan dan air.	- Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
	Stabilitas pasokan dan harga pangan	- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi distribusi dan perdagangan pangan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, pengembangan jaringan pemasaran dan distribusi antar daerah serta membuka daerah yang terisolir, pengembangan sistem informasi pasar, dan penguatan lembaga pemasaran daerah,	Penguatan lembaga distribusi pangan dan lembaga akses pangan masyarakat
		- Menjaga Stabilitas Harga Pangan, melalui peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, pengembangan sistem tunda jual , pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga dan stok minimal bulanan	- Pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis. - Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP)

MISI II Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan Masyarakat, Berbasis Sumber Daya Lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Memenuhi konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan halal	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui promosi konsumsi pangan lokal (umbi-umbian), sayuran dan buah-buahan, serta pangan hewani. - Pengembangan dan percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal melalui pengkajian berbagai teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya - Peningkatan pelayanan gizi dan kesehatan kepada masyarakat miskin yang terintegrasi dengan program penanggulangan kemiskinan dan keluarga berencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penetapan Pola Pangan Harapan (PPH) sebagai salah satu indikator keberhasilan Pembangunan Daerah dalam RPJMD Jawa Barat Tahun 2013-2018. - Implementasi Pergub No. 60 TH 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Potensi Lokal - Penguatan kelembagaan pedesaan seperti Posyandu, PKK, dan Dasa Wisma dalam pengawasan dan pemantauan tumbuh kembang anak serta tindak lanjut (rujukan) masalah gizi buruk.
	Peningkatan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Optimalisasi Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang telah dibentuk berdasarkan Keputusan Gub. Nor 501/Kep.236-BKPD/2010 Tahun 2010 tentang Penunjukan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai pelaksana Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah Jawa Barat

MISI III Meningkatkan Penanganan Daerah Rawan Pangan, melalui Pemberdayaan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan desa rawan pangan	Penurunan desa rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam mengakses pangan untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi Pemenuhan hak atas pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> Implementasi Keputusan Gubernur No. 465.05/Kep 367-BPMPPD/2010 tanggal 5 Feb 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan Sistem aplikasi KM 0 Pro Poor sbg rujukan penanganan kemiskinan berdasarkan pendekatan by name by address by picture.
Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> Mensinergikan program dan kegiatan ketahanan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas kompetensi SDM aparatur dan masyarakat bidang ketahanan pangan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Dewan Ketahanan Pangan Peningkatan manajemen kelembagaan ketahanan pangan

Program

Sedangkan kebijakan-kebijakan tersebut, dituangkan dalam program baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN Tahun Anggaran 2016, yaitu :

Sumber Dana APBD :

1. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah
2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
8. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah
9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
10. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

Sumber Dana APBN :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dituangkan dalam lampiran Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat.

a) Sasaran Strategik dan Target Indikatornya

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategik dan indikatornya, Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah menetapkan sasaran indikator dan target kinerjanya sesuai dokumen perencanaan adalah :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, dengan indikatornya adalah :
 - a. Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan sebesar 85 %
 - b. Jumlah Tonase cadangan pangan pokok pemerintah sebesar 450 ton

2. Stabilitas pasokan dan harga pangan, dengan indikatornya adalah :
Persentase Capaian Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis sebesar ≥ 100
3. Peningkatan kualitas pangan dan gizi, dengan indikatornya adalah :
 - a. Jumlah konsumsi pangan, Konsumsi energi sebesar 2050 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 56 gr/kapita/hari
 - b. Skor Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi sebesar 78 point
4. Peningkatan keamanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat sebesar 85 %
5. Penurunan desa rawan pangan, dengan indikatornya adalah :
Jumlah lokasi desa piloting pemanfaatan lahan pekarangan sebanyak 12 desa (100%)
6. Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Persentase program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota yang bersinergi sebesar 75%

b) Program dan Kegiatan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategik dengan rencana tingkat pencapaian indikator yang telah ditentukan, pada tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD maupun APBN, yaitu sebagai berikut :

Program dan Kegiatan APBD.

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan :

2. Kegiatan RTM OPD Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
3. Kegiatan RTM OPD Penanggulangan Potensi Kerawanan Pangan
4. Kegiatan RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat
5. Kegiatan RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
6. Kegiatan RTM OPD Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan
7. Kegiatan RTM OPD Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
8. Kegiatan RTM OPD Pengawasan Keamanan Pangan
9. Kegiatan RTM OPD Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat
10. Kegiatan RTM OPD Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
11. Kegiatan RTM OPD Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Cileutuh

C. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

13. Kegiatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14. Kegiatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPD

E. Program Pelayanan Administrasi

15. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPD Prov. Jabar

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

16. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

G. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur :

17. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

H. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

18. Pengelolaan Keuangan pada BKPD

I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

19. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan.

J. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah :

20. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan.

Program dan Kegiatan APBN.

Dana Dekonsentrasi :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Distribusi dan Harga Pangan).
2. Kegiatan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan)
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan (pelaksana teknis kegiatan oleh Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan).
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya.

c) Anggaran

Sumber Dana APBD :

Anggaran OPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 yang bersumber dari APBD berjumlah Rp 35.460.770.859,-, yang terbagi menjadi Jenis Belanja Langsung Rp 26.586.328.000,- dan Belanja Tidak Langsung Rp 8.874.442.859,-. Belanja Langsung terbagi menjadi:

A. Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah.

1. Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 415.000.000,-

B. Program Peningkatan Ketahanan Pangan :

2. Kegiatan RTM OPD Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.600.000.000,-
3. Kegiatan RTM OPD Penanggulangan Potensi Kerawanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.643.500.000,-
4. Kegiatan RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 460.000.000,-
5. Kegiatan RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.260.000.000,-
6. Kegiatan RTM OPD Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 485.000.000,-
7. Kegiatan RTM OPD Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.989.250.000,-
8. Kegiatan RTM OPD Pengawasan Keamanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.995.000.000,-
9. Kegiatan RTM OPD Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.180.000.000,-
10. Kegiatan RTM OPD Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.680.000.000,-
11. Kegiatan RTM OPD Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Cileutuh dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 275.000.000,-

C. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.

13. Kegiatan Sistem Informasi Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 394.000.000,-

D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

14. Kegiatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur BKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 397.000.000,-

E. Program Pelayanan Administrasi

15. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran BKPD Prov. Jabar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.833.000.000,-

F. Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur :

16. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.464.878.000,-

G. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur :

17. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.884.000.000,-

H. Program Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah

18. Pengelolaan Keuangan pada BKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-

I. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan :

19. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan Internal Badan Ketahanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 90.000.000,-

J. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah :

20. Kegiatan Penyusunan dan Penyajian Data dan Informasi/Statistik Kerawanan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 440.700.000,-

Sumber Dana APBN :

Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2016 berjumlah Rp 34.438.482.000,- terdiri dari :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.840.517.000,-
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.160.751.000,-
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.112.214.000,-
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.325.000.000,-

2.3. Perencanaan Kinerja Tahun 2017.

Seperti yang telah disampaikan di bagian sebelumnya, terdapat 6 (enam) rencana sasaran strategis yang ingin dicapai Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Uraian sasaran yaitu :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, dengan indikatornya adalah :
 - a. Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan sebesar 86 %
 - b. Jumlah Tonase cadangan pangan pokok pemerintah sebesar 500 ton
2. Stabilitas pasokan dan harga pangan, dengan indikatornya adalah :
Persentase Capaian Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis sebesar ≥ 100
3. Peningkatan kualitas pangan dan gizi, dengan indikatornya adalah :
 - a. Jumlah konsumsi pangan, Konsumsi energi sebesar 2010 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 58 gr/kapita/hari
 - b. Skor Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi sebesar 79 point
4. Peningkatan keamanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat sebesar 85 %

5. Penurunan desa rawan pangan, dengan indikatornya adalah :
Jumlah lokasi desa piloting pemanfaatan lahan pekarangan sebanyak 12 desa
(100%)

6. Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan, dengan indikatornya adalah :
Persentase program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota yang bersinergi sebesar 75%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran tersebut merupakan hasil suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator, keluaran dan hasil. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja merupakan beberapa tahapan yang berawal dari pengumpulan data kinerja hingga pengukuran kinerja. Indikator yang digunakan sebagai instrumen acuan telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja yang terdapat dalam Rencana Kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dalam formulir Rencana Strategi (RS) Tahun 2013 s/d 2018, formulir Rencana Kinerja Tahunan, formulir Penetapan Kinerja, dan formulir Pengukuran Kinerja.

Rumusan yang digunakan untuk mengetahui presentase tingkat capaian digunakan 2 (dua) rumusan yaitu :

- Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumusan :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat pencapaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Penilaian dilakukan dengan membandingkan hasil penghitungan dengan skala sebagai berikut :

- Lebih dari 100 % : Sangat Baik
- 100% > nilai > 80 % : Baik
- 80 % > nilai > 50 % : Cukup
- 50% > Nilai : Kurang

1.2. Kinerja Sasaran Strategik

Sasaran Strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat capaian kinerjanya pada tabel 2, berikut :

Tabel 2. Prosentase Tingkat Capaian Sasaran

1	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Sasaran
1.	Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup	- Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan - Jumlah Tonase Cadangan Pangan Pokok Pemerintah	85 450	86 (101%) 270 (60%)	80,5
2.	Stabilitas pasokan dan harga pangan	- Persentase Capaian Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis	≥ 100	≥ 125 (125%)	≥ 125
3.	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	- Prosentase Tingkat Konsumsi Pangan a. Konsumsi Energi (k.kal/kap/hr) b. Konsumsi Protein (gram/kap/hr) - Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi	100 2.050 56 78	106.81 2.165 (105,60) 60,5 (108.03) 81 (103,85)	105.33
4.	Peningkatan keamanan pangan	- Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat	85	98,5 (115,88)	115,88
5.	Penurunan desa rawan pangan	- Jumlah lokasi desa piloting pemanfaatan lahan pekarangan	12	12 (100%)	100
6.	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	- Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota	75	75 (100%)	100
	Rata-rata capaian				104,45

Dari tabel 2. di atas dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2016 adalah **104,45** %. Dengan angka capaian kinerja sasaran sebesar itu, maka Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat termasuk dalam kategori dengan kinerja **"Sangat Baik"**.

1.3. Evaluasi dan Analisis Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Strategik

Evaluasi dan analisis terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran strategik yang telah dicapai oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dapat disampaikan point-point sebagai berikut :

1. Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup

Pengadaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dan sesuai dengan persyaratan gizi, merupakan masalah besar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Untuk menjawab masalah ini diperlukan informasi mengenai situasi pangan disuatu negara/daerah pada periode tertentu. Hal ini dapat terlihat dari gambaran produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat ketersediaan untuk konsumsi penduduk per kapita.

Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi pangan mengenai ketersediaan energi dan ketersediaan protein dapat disajikan dalam suatu neraca atau tabel yang dikenal dengan nama Analisis Ketersediaan Energi dan Protein atau Neraca Bahan Makanan (NBM), yang sekaligus menjadi salah satu Indikator Tersedianya Pangan dalam jumlah yang cukup.

Pada Tahun 2016 telah disusun Analisis Ketersediaan Energi dan Protein berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 526.51/Kep.593/KRP/2014 Tanggal : 30 Maret 2014 tentang pembentukan Tim Analisis Ketersediaan di Jawa Barat yang anggotanya melibatkan OPD yang terkait dengan ketahanan pangan. Penyusunan NBM tersebut didukung oleh kegiatan yang dananya bersumber dari APBD dan APBN.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian sasaran Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup tahun 2016 ini sebesar 80,5%, yaitu untuk indikator Peningkatan ketersediaan Pangan berupa Skor Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan pangan dari target sebesar 85 point sedangkan capaian sebesar 86 point atau 101% yang terdiri dari ketersediaan energi sebesar 2515,15 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 79,08 untuk tahun 2016, Posisi capaian indikator Skor PPH tingkat ketersediaan mengalami peningkatan sebesar 1,4 point jika **dibandingkan** dengan tahun 2015 pencapaiannya sebesar 84,6 point.

Selain Peningkatan ketersediaan pangan berupa energi dan protein yang menjadi bagian indikator Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup, juga indikator lainnya adalah Penguatan cadangan pangan pokok pemerintah. Cadangan pangan merupakan salah satu sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan dalam negeri atau daerah. Stabilitas pasokan pangan dapat dijaga dengan pengelolaan cadangan yang tepat. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten bahwa target capaian penguatan cadangan Pemerintah di tingkat Provinsi minimal sebesar 200 ton ekuivalen beras, sementara target tahun 2016 dalam Rencana Strategi BKPD Jawa Barat adalah penambahan 450 ton beras untuk cadangan pangan Pemerintah Provinsi.

Pada Tahun 2016, capaian kinerja indikator Jumlah tonase cadangan pangan pokok pemerintah target sebanyak 450 ton, realisasinya sebanyak **270 ton** atau 60%. Dan **dibandingkan** dengan capaian sasaran pada Tahun 2015 prestasi capaian tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 180 ton, hal ini tidak sesuai dengan rencana strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 – 2018.

2. Stabilitas Pasokan dan harga Pangan

Distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau.

Pencapaian standar pelayanan minimal distribusi pangan dan akses pangan, dijabarkan dalam sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan yang dioperasionalkan melalui indikator Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis

Penjaminan Stabilitas Harga Pangan, melalui : (1) pemberlakuan Harga Pembelian Pemerintah pada komoditas pangan strategis , (2) pengembangan Buffer stock Management (pembelian oleh pemerintah pada waktu panen dan operasi pasar pada waktu paceklik) pada komoditas pangan strategis, (3) mendorong dan

mendukung adanya dana talangan pemerintah (propinsi dan kabupaten/kota) dalam menstabilkan harga komoditas pangan strategis, (4) peningkatan peranan Lembaga pembeli gabah dan Lembaga usaha ekonomi pedesaan, (5) mendorong dan mendukung pengembangan sistem tunda jual dan resi gudang, (6) pengembangan sistem informasi dan monitoring produksi, konsumsi, harga, stok dan pasokan pangan secara berkala.

Stabilitas pasokan dan harga pangan, berdasarkan Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat target capaian pada tahun 2016 adalah ≥ 100 , dengan realisasinya adalah $\geq 124,94$. Jika **dibandingkan** dengan tahun 2015 tidak mengalami penurunan yang sangat kecil.

3. Peningkatan kualitas pangan dan gizi

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi ganda di Indonesia, yaitu gizi kurang maupun gizi lebih.

Penganekaragaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk memantapkan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beraneka ragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang ditunjukkan dengan nilai 80 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2018.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas

produksi, penganeekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota disuatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani dan menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi pangan dapat pula dijadikan salah satu momentum bagi pemerintah untuk menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di pedesaan. Disamping itu jika dilihat dari kepentingan kemandirian pangan maka penganeekaragaman konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumen pada satu jenis pangan. Dengan demikian penganeekaragaman konsumsi pangan merupakan fondasi dari keberlanjutan ketahanan pangan dan memiliki dimensi pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganeekaragaman konsumsi pangan telah dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan. Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan dewasa ini adalah :

1. Belum tercapainya skor mutu keragaman dan keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan (skor PPH baru mencapai 78,3 pada tahun 2015) dan selama ini pencapaiannya berjalan sangat lamban dan fluktuatif;
2. Cukup tingginya kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa dan kota;
3. Adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
4. Lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima;
5. Masih belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
6. Kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka diadakan kegiatan Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), yang diharapkan dapat memberikan daya dorong yang kuat bagi penyediaan dan permintaan aneka ragam pangan secara nyata, yang secara simultan dapat mendorong terwujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang berbasis pada potensi sumber daya lokal.

Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Gubernur sebagai acuan yang dapat mendorong percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerja sama sinergis antara pemerintah pusat dan daerah.

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai Peningkatan kualitas pangan dan gizi diantaranya, adalah Persentase tingkat konsumsi pangan yang beragam seimbang, aman dan halal yaitu konsumsi energi, Konsumsi Protein dan Skor Pola Pangan Harapan.

a. Konsumsi Energi dan Protein

Manusia membutuhkan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan merupakan sumber energi untuk menunjang semua kegiatan atau aktifitas manusia. Manusia yang kurang makanan akan lemah baik daya kegiatan, pekerjaan fisik atau daya pemikirannya karena kurangnya zat-zat makanan yang diterima tubuhnya yang dapat menghasilkan energi. Seseorang tidak dapat menghasilkan energi yang melebihi dari apa yang diperoleh dari makanan kecuali jika meminjam atau menggunakan cadangan energi dalam tubuh, namun kebiasaan meminjam ini akan dapat mengakibatkan keadaan yang gawat, yaitu kekurangan gizi khususnya energy.

Tingkat konsumsi pangan tercermin dalam pola konsumsi masyarakat di tingkat rumah tangga yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain kondisi ekonomi, sosial dan budaya setempat. Untuk itu, penanaman kesadaran pola konsumsi yang sehat perlu dilakukan sejak dini melalui pendidikan formal dan non-formal.

Dengan kesadaran gizi yang baik, masyarakat dapat menentukan pilihan pangan sesuai kemampuannya dengan tetap memperhatikan kuantitas, kualitas, keragaman dan keseimbangan gizi, serta dapat meninggalkan kebiasaan serta budaya konsumsi yang kurang sesuai dengan kaidah gizi dan kesehatan. Kesadaran yang baik ini lebih menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi masing-masing anggota keluarga sesuai dengan tingkatan usia dan aktivitasnya.

Tubuh manusia tidak sanggup memenuhi protein untuk membentuk jaringan tubuhnya sendiri sehingga diperlukan protein yang berasal dari makanan sehari-hari. Untuk membentuk protein jaringan diperlukan asam-asam amino yang

cukup jumlah dan macamnya dalam darah sesuai dengan jaringan yang dibentuk. Asam–asam amino yang akan membentuk protein jaringan didapatkan dari bahan hasil metabolisme makanan yang diserap oleh tubuh. Tersedianya protein dalam tubuh, mencukupi atau tidaknya bagi keperluan-keperluan yang harus dipenuhinya, sangat tergantung pada susunan (komposisi) bahan makanan yang dikonsumsi oleh seseorang setiap harinya.

Selain itu, protein termasuk pula kedalam golongan zat pengatur, karena protein ikut pula mengatur berbagai proses tubuh, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai bahan pembentuk zat–zat yang mengatur berbagai proses tubuh.

Tingkat konsumsi energy untuk masyarakat di Jawa Barat, berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, sasaran ke 3 (tiga) yaitu Peningkatan kualitas pangan dan gizi dengan indikatornya Persentase tingkat konsumsi pangan tahun 2016 target sebesar 100% realisasinya sebesar 106.81% yang terdiri dari konsumsi energy target sebesar 2050 kkal/kapita/hari pada tahun 2016 realisasinya sebesar 2165 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein target sebesar 56 gram/kapita/hari realisasinya sebesar 60.5 gram/kapita/hari, artinya realisasi pencapaian sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat. Jika **dibandingkan** dengan tahun 2015 pencapaian persentase tingkat konsumsi pangan sebesar 103.30% mengalami sedikit peningkatan sebesar 2,3% ditahun 2016.

b. Skor Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan merupakan acuan untuk menilai tingkat keragaman konsumsi pangan dengan skor 100 sebagai pola yang ideal. Sementara PPH Jawa Barat baru mencapai 81 point, seperti pada tabel berikut :

Tabel. 3

Skor Pola Pangan Harapan Jawa Barat Tahun 2015

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	328,2	1.400,5	64,7	70,0	0,5	32,3	35,0	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	28,1	30,8	1,4	1,5	0,5	0,7	0,8	2,5	0,8
3	Pangan Hewani	90,4	212,6	9,8	10,6	2,0	19,6	21,3	24,0	21,3
4	Minyak dan Lemak	24,5	261,4	12,1	13,1	0,5	6,0	6,5	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,7	15,5	0,7	0,8	0,5	0,4	0,4	1,0	0,4
6	Kacang-kacangan	19,8	50,7	2,3	2,5	2,0	4,7	5,1	10,0	5,1
7	Gula	11,9	63,2	2,9	3,2	0,5	1,5	1,6	2,5	1,6
8	Sayur dan Buah	203,8	87,6	4,0	4,4	5,0	20,2	21,9	30,0	21,9
9	Lain-lain	78,8	43,0	2,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total		2.165,3	100,0	108,3		85,4	92,5	100,0	81,0

Keterangan = *) Angka
Kecekupan Energi

2.000

Kkal/Kapita/Hari

Berdasarkan skor PPH tersebut di atas, maka realisasi sasaran meningkatnya penganekaragaman konsumsi pangan dengan indikator Skor PPH pada tahun 2015 dari target 78 poin sudah dapat dicapai sebesar 81 point atau 103.85 %.

4. Peningkatan Keamanan Pangan

Keamanan Pangan merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang mengganggu, merugikan, dan membahayakan manusia.

Pada Tahun 2016, Sasaran selanjutnya adalah Peningkatan Keamanan Pangan dengan Indikatornya adalah Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat, target capaian sebesar 85% (sebanyak 200 komoditi yang diuji), realisasi capaiannya adalah sebesar 98,5% (hasil uji laboratorium terhadap 197 komoditi) artinya hanya 197 komoditi yang dikategorikan bebas residu dan bahan kimia, sehingga layak untuk diberikan sertifikat prima 2 dan 3.

5. Penurunan desa rawan pangan

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. Rawan pangan terdiri dari Rawan pangan kronis yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.

Rawan Pangan Transien yaitu suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial), maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti: bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

Desa Mandiri Pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian sasaran Penurunan desa rawan pangan dengan indikatornya yaitu Jumlah lokasi desa piloting pemanfaatan lahan pekarangan dari target tahun 2016 sebanyak 12 desa realisasinya sebanyak 12 desa atau 100% melalui Intervensi Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan sebanyak 12 Desa. Jika **dibandingkan** dengan perolehan pada Tahun 2015 tidak mengalami peningkatan, karena desa yang diintervensi kegiatan sama dengan tahun lalu. Dengan capaian tersebut, maka sesuai dengan total capaian target Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018.

6. Peningkatan Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan

Pencapaian Misi Badan Ketahanan tentunya tidak mungkin terwujud tanpa adanya dukungan manajemen baik itu aspek kelembagaan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana serta dukungan financial.

Hasil perhitungan terhadap indikator-indikator Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota, adalah dari target sebesar 75% realisasi sebesar 75% (artinya seluruhnya dapat direalisasikan). Jika **dibandingkan** dengan Tahun 2015 adalah sebesar 100 % pencapaiannya masih sama.

1.4. Akuntabilitas Keuangan

Berdasarkan ketetapan Undang-undang No. 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, salah satu asas dari penyelenggaraan Negara adalah asas Akuntabilitas. Yang dimaksud dengan Akuntabilitas berdasarkan Buku Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/Badan Hukum/Pimpinan Kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan Ketahanan Pangan di Jawa Barat, Badan Ketahanan Pangan Daerah Jawa Barat untuk tahun 2015 memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN.

a) Anggaran Bersumber dari APBD

Berdasarkan dokumen lembar penetapan kinerja sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2016 besaran anggaran sebelum mengalami perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah seperti pada tabel 3 berikut :

Tabel. 4.

Penetapan Kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			SATUAN	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	6	7
1.	Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup	<ul style="list-style-type: none"> - Skor Pola Pangan Harapan Tingkat Ketersediaan - Jumlah tonase cadangan pangan pokok pemerintah 	<p>85</p> <p>450</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RTM OPD Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Pemerintah 	<p>3.600.000.000,-</p>
2.	Stabilitas pasokan dan harga pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase capaian stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis 	<p>≥ 100</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat. - RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat. - RTM OPD Pemantauan harga dan pasokan pangan 	<p>460.000.000,-</p> <p>1.260.000.000,-</p> <p>485.000.000,-</p>
3.	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase tingkat konsumsi pangan <ul style="list-style-type: none"> a. Konsumsi energy b. Konsumsi protein - Skor Pola Pangan Harapan tingkat konsumsi 	<p>100</p> <p>2050</p> <p>56</p> <p>78</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RTM OPD Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. - RTM OPD Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Cileutuh 	<p>2.989.250.000,-</p> <p>275.000.000,-</p>
4.	Peningkatan Keamanan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat 	<p>85</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RTM OPD Pengawasan Keamanan Pangan 	<p>2.995.000.000,-</p>
5.	Penurunan desa rawan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah lokasi desa piloting pemanfaatan lahan pekarangan 	<p>12</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RTM OPD Penanggulangan Potensi Kerawanan Pangan 	<p>2.643.500.000,-</p>
6.	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota 	<p>75</p>	<ul style="list-style-type: none"> - RTM OPD Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat - RTM OPD Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat 	<p>1.180.000.000,-</p> <p>1.680.000.000,-</p>

Dari tabel diatas, dapat disampaikan jumlah anggaran yang mendukung terhadap sasaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Belanja Langsung sebesar Rp.17.567.750.000,- dan untuk tahun 2016 ini tidak terdapat Belanja Bantuan Hibah (Belanja Tidak Langsung).

b) Anggaran Bersumber dari APBN

Sumber Dana APBN :

Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2016 berjumlah Rp 34.438.482.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 32.931.467.320,- atau 96 % terdiri dari :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.840.517.000,- realisasinya sebesar Rp,
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.160.751.000,-
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.112.214.000,-
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.325.000.000,-

c) Anggaran dan Realisasi Terhadap Sasaran Tahun 2016

Realisasi Anggaran APBD

Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa terdapat 6 (enam) sasaran yang ditargetkan oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 berikut dengan alokasi anggaran bersumber dari APBD. Untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 17.567.750.000,- dan untuk tahun 2016 ini tidak terdapat Belanja Bantuan Hibah (Belanja Tidak Langsung). Berikut ini adalah rincian sasaran, kegiatan, anggaran, dan realisasi anggaran, seperti pada tabel 4 berikut :

Tabel.5
Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2015

No	Sasaran Strategis	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran	
				(Rp.)	(%)
1.	Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup.	- RTM OPD Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Pemerintah.	3.600.000.000,-	3.463.967.029,-	96,22
2.	Stabilitas pasokan dan harga pangan	- RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat.	460.000.000,-	313.967.780,-	68,25
		- RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.	1.260.000.000,-	1.135.315.850,-	90,10
		- RTM OPD Pemantauan harga dan pasokan pangan	485.000.000,-	472.523.420,-	97,43
3.	Peningkatan kualitas pangan dan gizi	- RTM OPD Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan.	2.989.250.000,-	2.721.623.408,-	91,05
		- RTM OPD Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Cileutuh	275.000.000,-	273.353.111,-	99,40
4.	Peningkatan Keamanan Pangan	- RTM OPD Pengawasan Keamanan Pangan	2.995.000.000,-	2.594.773.947,-	86,64
5.	Penurunan desa rawan pangan	- RTM OPD Penanggulangan Potensi Kerawanan Pangan	2.643.500.000,-	2.479.660.675,-	93,80
6.	Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan	- RTM OPD Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat.	1.180.000.000,-	984.321.874,-	83,42
		- RTM OPD Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat	1.680.000.000,-	1.637.923.573,-	97,50
	Jumlah Belanja Langsung		17.567.750.000,-	16.077.430.667	91,52
	Jumlah Belanja Tdk Langsung		0,-	0,-	0,-
	Jumlah Belanja Langsung dan Belanja Tdk Langsung		17.567.750.000,-	16.077.430.667	91,52

Dari tabel diatas, memperlihatkan jumlah Belanja Langsung yang mendukung kepada Sasaran Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 17.567.750.000,- terealisasi sebesar Rp. 16.077.430.667,- atau 91,52 %. Dibawah disampaikan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis, sebagai berikut :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup

Indikator yang dapat digunakan untuk menilai Peningkatan kualitas pangan dan gizi diantaranya, adalah Persentase tingkat konsumsi pangan yang beragam seimbang, aman dan halal yaitu konsumsi energi, Konsumsi Protein dan Skor Pola Pangan Harapan.

Berdasarkan hal tersebut, maka capaian sasaran Peningkatan Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup tahun 2016 ini sebesar 80,5%, yaitu untuk indikator Peningkatan ketersediaan Pangan berupa Skor Pola Pangan Harapan tingkat ketersediaan pangan dari target sebesar 85 point sedangkan capaian sebesar 86 point atau 101% yang terdiri dari ketersediaan energi sebesar 2515,15 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 79,08 untuk tahun 2016.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah RTM OPD Penguatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan Pemerintah.

2. Stabilitas pasokan dan harga pangan

Indikator sasaran ini adalah Stabilitas pasokan dan harga pangan pokok strategis dengan target sebesar ≥ 100 capaian realisasi sebesar ≥ 125 . Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah RTM OPD Pemantuan distribusi, harga dan akses pangan, RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan RTM OPD Penguatan dan Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat.

3. Peningkatan Kualitas pangan dan gizi

Tingkat konsumsi energy untuk masyarakat di Jawa Barat, berdasarkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2013-2018, sasaran ke 3 (tiga) yaitu Peningkatan kualitas pangan dan gizi dengan indikatornya Persentase tingkat konsumsi pangan tahun 2016 target sebesar 100% realisasinya sebesar 106.81% yang terdiri dari konsumsi energy target sebesar 2050 kkal/kapita/hari pada tahun 2016 realisasinya sebesar 2165 kkal/kapita/hari, dan konsumsi protein target sebesar 56 gram/kapita/hari realisasinya sebesar 60.5 gram/kapita/hari.

indikator Skor PPH pada tahun 2015 dari target 76 poin sudah dapat dicapai sebesar 78.3 point atau 103.02 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah RTM OPD Peningkatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), dan RTM OPD Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari di Cileutuh.

4. Peningkatan keamanan pangan

Indikatornya adalah Persentase sampel komoditi pangan segar yang tersertifikat, target capaian sebesar 85% (sebanyak 200 komoditi yang diuji), realisasi capaiannya adalah sebesar 98,5% (hasil uji laboratorium terhadap 197 komoditi) artinya hanya 197 komoditi yang dikategorikan bebas residu dan bahan kimia, sehingga layak untuk diberikan sertifikat prima 2 dan 3.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah RTM OPD Pengawasan Keamanan Pangan

5. Penurunan desa rawan pangan

Indikator yang digunakan untuk melihat capaian sasaran Penurunan desa rawan pangan dengan indikatornya yaitu Jumlah lokasi desa piloting pemanfaatan lahan pekarangan dari target tahun 2016 sebanyak 12 desa realisasinya sebanyak 12 desa atau 100% melalui Intervensi Kegiatan Piloting Penanggulangan Kemiskinan Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan sebanyak 12 Desa.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah RTM OPD Penanggulangan Potensi Kerawanan Pangan.

6. Peningkatan sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan

Indikator sasaran ini adalah Sinergitas program dan kegiatan ketahanan pangan tingkat provinsi dan kab./kota dengan target sebesar 75 % realisasi capaian sebesar 75 %.

Kegiatan yang mendukung sasaran ini adalah RTM OPD Dewan Ketahanan Pangan Jawa Barat, dan RTM OPD Pengembangan Manajemen Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan Jawa Barat.

Realisasi Anggaran APBN

Anggaran Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat yang bersumber dari APBN dana Dekonsentrasi Anggaran Tahun 2016 berjumlah Rp 34.438.482.000,- dengan capaian realisasinya sebesar Rp. 32.931.467.320,- atau 98%, terdiri dari :

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat :

1. Kegiatan Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 21.840.517.000,- realisasinya sebesar Rp. 20.951.225.130,- atau 95,92%
2. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.160.751.000,- realisasinya sebesar Rp. 97,53%
3. Kegiatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan Segar dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.112.214.000,- realisasinya sebesar Rp. 9.617.043.550,- atau 95,10%
4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.325.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 1.232.050.550,- atau 92,98%.

1.5. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

Untuk mengetahui sampai sejauh mana pencapaian Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, dibandingkan dengan Target Kinerja Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang ditargetkan dilihat pada Tabel 5 berikut :

Tabel. 5
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2016

No	Sasaran	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)		Target s.d 2015 (RPJMD)
				Tahun ini	Tahun lalu	
	Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pangan (s.d tahun 2018) melalui Peningkatan Kualitas Pangan dan Gizi	82	81	103	103	78

Berdasarkan Sasaran Indikator Kinerja Utama Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016, yaitu Peningkatan Pola Pangan Harapan Tingkat Konsumsi dengan target sebesar 78 point realisasi capaian sebesar 81 point atau 103,88 % (masih kurang dari target s.d tahun 2018).

BAB IV PENUTUP

4.1. Keberhasilan Kinerja Sasaran Strategik

Berdasarkan Hasil evaluasi kinerja sasaran strategik, Nilai capaian kinerja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2015 adalah sebesar **104,45 %**. Dengan nilai capaian tersebut, maka Kinerja Badan ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat masuk kategori **"Sangat Baik"**.

Berikut ini adalah keberhasilan yang dicapai Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa Barat selama tahun 2015 :

1. Peningkatan ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup
 - a. Berdasarkan Neraca Bahan Makanan, bahwa ketersediaan energy dan ketersediaan protein untuk masyarakat Jawa Barat selama Tahun 2016 dalam jumlah yang cukup dan pada umumnya merupakan hasil dari produksi sendiri.
 - b. Untuk mengantisipasi kerawanan pangan, ada penambahan pangan pemerintah sebesar 200 ton pada tahun 2016, sehingga memasuki Tahun 2016 total cadangan pangan pemerintah provinsi yang tersedia di Gudang BULOG 270 ton.
2. Stabilitas pasokan dan harga pangan
 - a. Pangan dapat didistribusikan secara merata keseluruh Daerah di Jawa Barat, sehingga harga pangan antar daerah relative sama.
 - b. Berdasarkan data harga dan pasokan pangan, secara umum kondisi 10 pangan pokok di 26 Kabupaten Kota dalam kondisi stabil.
 - c. Ketersediaan informasi harga di tingkat petani penggilingan padi, secara umum 100% dapat terinformasikan sesuai target di sentra-sentra produksi padi.

3. Peningkatan kualitas pangan dan gizi
 - a. Pemenuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan halal realisasinya tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, hal tersebut terlihat dari capaian konsumsi energy sebesar 2.165 k.kal/kapita/hari dan konsumsi protein sebesar 60.5 gram/kapita/hari mengalami peningkatan dari tahun 2015.
 - b. Capaian Skor Pola Pangan Harapan pada tahun 2016 ini sebesar 81 point mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2015.

4.2. Kendala dan hambatan dalam Pencapaian Sasaran

Walaupun secara umum Pemerintah sudah mampu menyediakan pangan dan mendistribusikannya secara merata keseluruh daerah, sehingga pangan mudah dijangkau, tetapi belum menjadi Jaminan bahwa seluruh penduduk Jawa Barat pada tahun 2015 yang berjumlah 47.432.900 Jiwa, dapat memenuhi kebutuhan pangannya dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, berimbang, aman dan halal sebagaimana di amanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, karena pada kenyataannya masih terdapat sebagian masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan yang belum mampu mengakses pangan. Hal tersebut bisa terlihat dari :

- a. Hasil pemetaan kerawanan pangan, menunjukkan bahwa sebanyak 23,01% kecamatan di Jawa Barat masuk dalam kategori sangat rawan sampai cukup rawan, baik yang bersifat kronis maupun transien.
- b. Pola konsumsi pangan masyarakat yang masih jauh dari harapan, dimana skor PPH baru mencapai 81 point

Pada tahun 2015, penduduk Jawa Barat diperkirakan sebanyak 46,7 juta jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dalam hal jumlah penduduk. Terdiri atas laki-laki sebanyak 23,68 juta jiwa dan perempuan sebanyak 23,03 juta, sehingga angka sex ratio di Jawa Barat sebesar 102,83 yang artinya terdapat 102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 penduduk perempuan. Jika dilihat menurut kabupaten/kota, Kabupaten Cianjur dan Indramayu memiliki sex ratio tertinggi, yaitu 106,1; sedangkan yang terendah Kabupaten Ciamis 97,7. Sebagian besar

kabupaten/kota memiliki angka sex ratio lebih dari 100, yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi, kecuali di enam kabupaten yang memiliki sex ratio kurang dari 100, yaitu Kabupaten Ciamis, Pangandaran, Tasikmalaya, Majalengka, Sumedang, dan Kota Banjar. Penduduk terbesar berada di Kabupaten Bogor yang dihuni sebanyak 5,45 juta jiwa, diikuti Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bekasi, masing-masing 3,53 juta dan 3,24 juta jiwa. Sedangkan kabupaten/kota dengan populasi terkecil adalah Kota Banjar.

Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada bulan September 2015 sebesar 4.485.654 orang (9,57 persen). Mengalami kenaikan sebesar 49.955 orang (1,13 persen) dibandingkan kondisi pada bulan Maret 2015 sebesar 4.435.699 orang (9,53 persen). Dalam kurun waktu enam bulan terakhir persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan turun sebesar -0,21 persen poin (11,82 persen menjadi 11,61 persen) sedangkan di daerah perkotaan naik 0,15 persen poin (dari 8,43 persen menjadi 8,58 persen). Secara absolut selama periode Maret 2015-September 2015, penduduk miskin di perdesaan berkurang 18.182 orang (dari 1.797.316 orang menjadi 1.779.134 orang) sementara di perkotaan bertambah sebanyak 68.137 orang dari 2.638.383 orang menjadi 2.706.520 orang).

Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan pada bulan September 2015 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 39,66 persen. Ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Maret 2015 (40,52%). Persentase penduduk miskin yang tinggal di daerah perkotaan pada bulan September 2015 terhadap penduduk miskin Jawa Barat adalah sebesar 60,34 persen. Ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Maret 2015 (59,48%).

Kondisi tersebut disebabkan karena rendahnya kemampuan daya beli masyarakat yang sangat berkaitan dengan faktor kemiskinan, setengah dari kelompok miskin ini adalah petani kecil, dan seperlima dari kaum miskin tersebut adalah para buruh tani yang tidak mampu memproduksi bahan pangan untuk kebutuhan keluarganya sendiri. Kelompok miskin inilah yang akan menjadi fokus perhatian dalam pembangunan ketahanan pangan, sesuai dengan komitmen Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan Ketahanan Pangan.

4.3. Langkah Antisipasi

Penduduk miskin memiliki resiko tinggi dan rentan terhadap kerawanan pangan. Apabila program-program pemantapan ketahanan pangan kurang memperhatikan kelompok ini, maka akan berdampak pada peningkatan kemiskinan/kerawanan pangan dan status gizi yang rendah.

Pengentasan kemiskinan masyarakat kombinasi pendekatan antara proses pemberdayaan masyarakat dengan dukungan intervensi oleh pemerintah. Pemberdayaan dilaksanakan dengan sasaran kaum miskin yang aktif secara ekonomis, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya merencanakan dan melaksanakan usaha ekonomi produktif. Dukungan pemerintah selain dalam bentuk akses terhadap prasarana dan sarana (lahan, pasar, informasi, sumber permodalan dan lain- lain) yang lebih memadai, juga kebijakan penunjangnya seperti perdagangan dan subsidi. Pada tahap berikutnya, dilakukan penumbuhan kewirausahaan, peningkatan skala ekonomi komersial, peningkatan akses pasar, pemberian insentif dan akses terhadap informasi yang bermanfaat.

Oleh sebab itu pembangunan ketahanan pangan yang berbasis pedesaan dan pemberdayaan masyarakat diyakini merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya untuk sebagian masyarakat yang berada di pedesaan.